

ANALISIS PENGARUH SERTA PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA AMBON

Selly Sipakoly

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

Email: sipakolyselly@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh serta pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. Sampel dalam penelitian adalah 84 periode pengamatan yang diperoleh dari data pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah kota Ambon periode tahun 2010-2016. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji pengaruh bersama-sama dengan tingkat kepercayaan 5%. Hasil uji hipotesis melalui uji t-statistik. Sedangkan pengujian pertumbuhan daerah menggunakan rumus pertumbuhan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah yang diukur dengan rasio. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh positif (0.499) dengan nilai probabilitas 0.000. Jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, Retribusi Daerah berpengaruh positif (0.176) dengan nilai probabilitas 0.000. Jika diukur dengan derajat signifikan 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pembangunan dan perekonomian daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah lebih mengetahui dan memahami kebutuhan dan kondisi serta keinginan masyarakat yang berada di daerah masing-masing dibandingkan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah secara khusus untuk mengatur dan mengurus bidang keuangan daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan di daerah. Kemampuan administrasi pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap realisasi penerimaan pendapatan dan tanggungjawab aparat pemerintah daerah untuk melaksanakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan berbagai pos pendanaan sumber dana yang tersedia diharapkan dapat menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Kebutuhan daerah yang semakin besar dibiayai oleh PAD, maka semakin tinggi tingkat kualitas ekonomi daerah dan semakin mandiri keuangan daerah.

Dalam proses menuju suatu kemandirian suatu daerah otonomi terutama dalam pembiayaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pembangunan dirasa masih kurang. Kenyataan ini tercermin dari kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah teristimewa di kabupaten/kota. Permasalahan ini dialami oleh pemerintah kota Ambon dalam pembiayaan

keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian yang dilakukan oleh Rifai Bugis (2013), dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Maluku Tahun 1990-2010”, tujuan untuk menganalisis pertumbuhan PAD di Propinsi Maluku dan pengaruh wisatawan, PDRB, dan inflasi terhadap peningkatan PAD di Propinsi Maluku, sampel data penelitian adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diambil dari badan atau instansi lain yang terkait dengan penelitian ini, seperti data yang bersumber dari laporan dan publikasi BPS (Badan Pusat Statistik), dengan jenis data runtun waktu (time series) selama kurun waktu tahun 1990-2010. Hasil model analisis mengacuh pada penurunan model error correction model (ECM), uji stasioneritas, analisis jangka pendek dan analisis jangka panjang. Dengan kesimpulan bahwa inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan jumlah wisatawan dan produk domestik regional bruto tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Nugroho (2013), dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2010-2012”, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD pada kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2010-2012. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis. Dengan kesimpulan bahwa penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Stevanus J. Gomie dan Victor Pattiasina (2011), dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, dengan tujuan untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil metode analisis yang digunakan adalah

regresi linier berganda dan uji statistik, dengan kesimpulan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat menaikkan pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat jika terjadi kenaikan 1% terhadap pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang masing-masing sebesar 0,249% dan 0,548%.

Penelitian yang dilakukan oleh Esti Purwaningsih (2011), dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008”, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil metode analisis yang digunakan yaitu uji hipotesis, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Dengan kesimpulan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap PAD, jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap PAD dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa laju pertumbuhan pajak daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon.
2. Diduga bahwa laju pertumbuhan Retribusi daerah memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon.
3. Diduga bahwa laju pertumbuhan pajak dan retribusi memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah data dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon dan Dinas-Dinas yang terkait pada Pemerintah Kota Ambon (Dispemkot, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, SKPD Pengelola PAD Kota Ambon).

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel independen (variabel terpengaruh) dan variabel dependen (variabel berpengaruh) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a). Variabel independen adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b). Variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah.

Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah

Total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon mulai tahun 2009–2015 diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam satuan miliaran rupiah pertahun.

2. Pajak Daerah
Total penerimaan Pajak Daerah Kota Ambon mulai tahun 2010–2016 yang diperoleh dari wajib pajak.
3. Retribusi Daerah
Total penerimaan Retribusi Daerah Kota Ambon mulai tahun 2010–2016 yang diperoleh dari masyarakat yang menggunakan sarana yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

3.3. Teknik Analisa Data

Metode analisis merupakan metode yang digunakan untuk memproses hasil penelitian guna memperoleh kesimpulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengukur besar laju pertumbuhan pajak dan retribusi maka dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Laju pertumbuhan pajak atau retribusi} = \frac{\text{pajak atau retribusi tahun } n - \text{pajak atau retribusi tahun } n-1}{\text{pajak atau retribusi tahun } n-1} \times 100\% \dots\dots\dots(3.1)$$

2. Untuk mengukur Pendapatan Asli Daerah menggunakan Uji regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots(3.2.)$$

Dimana:

Y= Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X1 = Laju Pertumbuhan Pajak

X2 = Laju Pertumbuhan Retribusi

e = eror

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data Penelitian

Berdasarkan data yang ada pada dinas terkait pada pemerintah kota Ambon yang berkaitan dengan besaran penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah serta besarnya nilai pendapatan daerah periode tahun 2009-2015 terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Hasil Pengumpulan Data Penelitian

Tahun	Pajak Daerah Daerah	Retribusi Daerah	PAD
2010	9,728,221,000.00	7,775,619,000.00	20,619,217,534.59
2011	10,265,345,251.10	10,542,361,251.41	28,469,444,378.71
2012	15,129,828,891.00	11,107,670,200.00	29,657,499,802.42
2013	18,386,042,703.40	13,918,430,009.83	33,861,064,941.05
2014	32,930,258,138.20	17,072,736,203.03	53,330,515,868.43
2015	39,299,981,668.80	15,936,944,023.00	58,252,561,996.39
2016	44,983,335,424.40	17,660,700,927.00	66,178,584,704.93

Sumber: Dinas PPKAD Kota Ambon

Dari data sampel tersebut diketahui ada sebanyak 7 tahun dan data nantinya diuraikan dalam besaran penerimaan per bulan sehingga menghasilkan 84 periode pengamatan yang dipakai untuk pengujian selanjutnya.

4.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil analisis statistika deskriptif dalam tabel dibawah ini meliputi variabel pendapatan asli daerah (PAD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sampel sebanyak 84 obsevasi yang dipakai untuk melakukan pengujian bersumber data variabel penelitian tahun 2009-2015 yang diakumulasi untuk data perbualan menunjukkan hasil statistic deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics				
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	1.16E9	6.31E9	3.2044E9	1.22198E9
PAJAK	6.44E8	6.65E9	1.7071E9	1.06685E9
RETRIBUSI	5.13E8	7.57E9	1.6968E9	1.66907E9
LnPAD	20.87	22.57	21.8125	.39873
LnPajak	20.28	22.62	21.0987	.54987
LnRetribusi	20.06	22.75	20.9573	.68812
Valid N (listwise)				

Sumber : Data sekunder yang diolah

Hasil pada tabel diatas menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah data terendah ada pada nilai 1.16E9 dan angka tertinggi pada nilai 6.31E9 dan nilai rata-rata pada nilai 3.2044E9 serta standar deviasi 1.22198E9. Hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari nilai rata-rata variabel dimaksud, yang berarti data variabel Pendapatan Asli Daerah baik. Selanjutnya variabel Pajak Daerah berdasarkan tabel di atas menunjukkan data terendah ada pada nilai 6.44E8 dan tertinggi pada nilai 6.65E9 serta nilai rata-rata sebesar 1.7071E9 dan nilai standar deviasi sebesar 1.06685E9. Dari data dimaksud, terlihat bahwa standar deviasi variabel Pajak Daerah lebih kecil dari nilai rata-rata variabel tersebut yang berarti bahwa data variabel Pajak Daerah baik. Variabel Retribusi Daerah berdasarkan tabel di atas menunjukkan data terendah ada pada nilai 5.13E8 dan tertinggi pada nilai 7.57E9. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 1.6968E9 dan standar deviasi sebesar 1.66907E9. Dari data dimaksud terlihat bahwa standar deviasi variabel Retribusi Daerah lebih kecil dari nilai rata-rata variabel tersebut yang berarti bahwa data variabel Retribusi Daerah baik.

Selanjutnya karena data penelitian yang dalam nominal yang besar dan berdasarkan ketentuan pengujian selanjutnya data dimaksud haruslah di *log-n*, hasilnya menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah (LnPAD) data terendah ada pada nilai 20.87 dan angka tertinggi pada nilai 22.57 dan nilai rata-rata pada nilai 21.8125 serta standar deviasi 0.39873. Hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi Pendapatan Asli Daerah (LnPAD) lebih kecil dari nilai rata-rata variabel dimaksud, yang berarti data variabel Pendapatan Asli Daerah (LnPAD) baik. Selanjutnya variabel Pajak Daerah (LnPajak Daerah) berdasarkan tabel di atas menunjukkan data terendah ada pada nilai 20.28 dan tertinggi pada nilai 22.62 serta nilai rata-rata sebesar 21.0987 dan nilai standar deviasi sebesar 0.54987. Dari data dimaksud, terlihat bahwa standar deviasi variabel Pajak Daerah (LnPajak Daerah) lebih kecil dari nilai rata-rata variabel tersebut yang berarti bahwa data variabel Pajak Daerah (LnPajak Daerah) baik. Variabel

Retribusi (LnRetribusi) berdasarkan tabel di atas menunjukkan data terendah ada pada nilai 20.06 dan tertinggi pada nilai 22.75. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 20.9573 dan standar deviasi sebesar 0.68812. Dari data dimaksud terlihat bahwa standar deviasi variabel Retribusi (LnRetribusi) lebih kecil dari nilai rata-rata variabel tersebut yang berarti bahwa data variabel Retribusi (LnRetribusi) baik.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Pengujian Normalitas

Untuk Menguji normalitas data, dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S Model). Adapun hasil output SPSS untuk pengujian normalitas data untuk model penelitian pertama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.
Uji Normalitas K-S Model

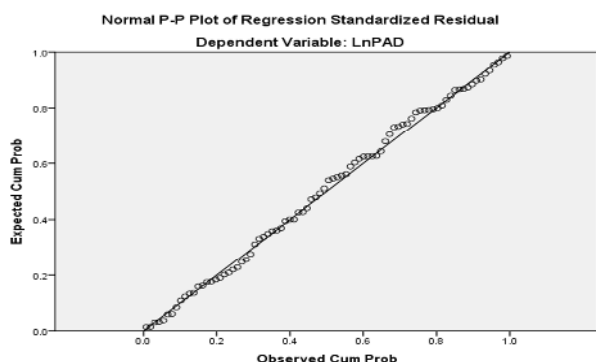
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		LnPAD	LnPajak	LnRetribusi
N		84	84	84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	21.8125	21.0987	20.9573
	Std. Deviation	.39873	.54987	.68812
Most Extreme Differences	Absolute	.084	.116	.217
	Positive	.045	.116	.217
	Negative	-.084	-.088	-.103
Kolmogorov-Smirnov Z		.770	1.064	1.990
Asymp. Sig. (2-tailed)		.593	.207	.276

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder yang diolah

Hasil uji normalitas dengan menggunakan K-S Model di atas, terlihat bahwa nilai *kolmogorof smirnov test* variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 0.770 serta signifikan jauh di atas nilai signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0.593. Hal ini berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Lebih lanjut, *kolmogorof smirnov test* variabel pajak daerah adalah sebesar 1.064 serta signifikan di atas nilai signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0.207 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Selanjutnya, *kolmogorof smirnov test* variabel retribusi daerah adalah sebesar 1.990 serta signifikan di atas nilai signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0.276 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Selain uji normalitas dengan *Kolmogorof-Smirnov Test*, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat grafik p-plot yang terlihat pada gambar berikut ini:

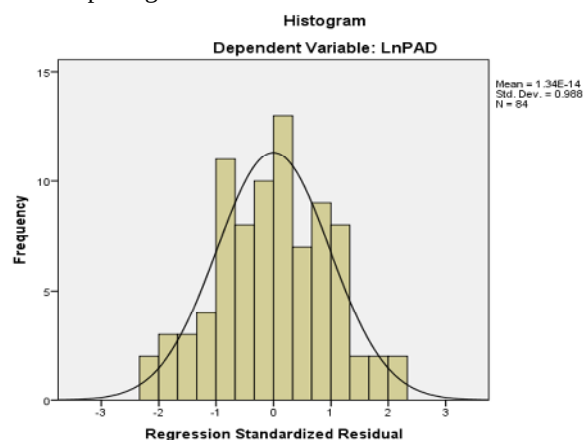


Sumber: Data sekunder yang diolah

Gambar 4.1.
Uji Normalitas Grafik P-Plot

Pada grafik p-plot di atas, terlihat titik-titik menyebar menghimpit disekitar garis diagonal sehingga

dapat disimpulkan bahwa data penelitian untuk variabel independen Pajak Daerah dan Retribusi terdistribusi secara normal. Selanjutnya uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Data sekunder yang diolah

Gambar 4.2.
Uji Normalitas Grafik Histogram

Pada grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang normal, artinya tidak menceng kekanan atau ke kiri sehingga data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

4.4. Hasil Pengujian Multikolonieritas

Ada tidaknya korelasi antar variabel-variabel tersebut, dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,01 dan *VIP* < 10 maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antara variabel independen dan sebaliknya. Hasil pengujian multikolonieritas untuk model pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.602	1.030		
	LnPajak Daerah	.499	.046	.890	1.124
	LnRetribusi	.176	.037	.890	1.124

a. Dependent Variable: LnPAD

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka *tolerance* dari variabel independen belanja modal nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Disamping itu, hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan hal yang sama, dimana tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang ada tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen. Karena syarat model dikatakan tidak terjadi multikolonieritas apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10.

4.5. Hasil Pengujian Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, hasilnya diketahui dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-Test). Hasil uji autokorelasi model pertama dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.5.
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Durbin-Watson
1	.839 ^a	.704	1.945

a. Predictors: (Constant), LnRetribusi, LnPajak Daerah

b. Dependent Variable: LnPAD

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari output model summary pada tabel di atas terlihat bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1.945 dan nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikansi 5% dengan jumlah sampel 84 dengan jumlah variabel independen 2 (K=2). Berdasarkan output uji korelasi tersebut, maka perhitungan untuk nilai DW tabel dan DW hitung seperti terlihat dalam tabel berikut:

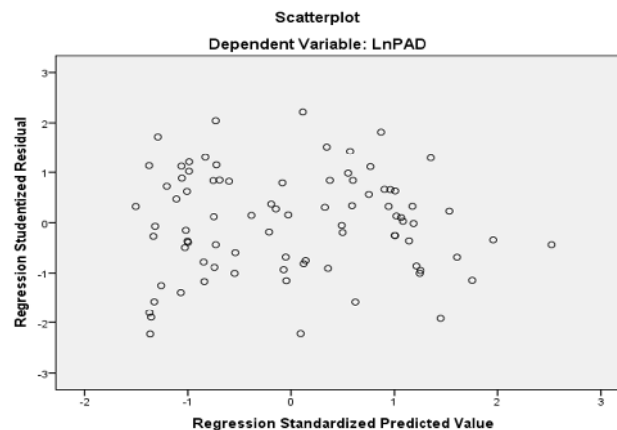
Tabel 4.6.
Nilai DW dan DU

N	Nilai DW	Nilai DU	DU<DW
84	1.945	1.696	1.696<1.945

Dari tabel di atas terlihat bahwa, nilai DW adalah sebesar 1.945 sedangkan nilai DU adalah sebesar 1.696 maka persyaratan $DU < DW$ dapat terpenuhi sehingga nilai yang diperoleh telah memenuhi syarat tidak terkena autokorelasi.

4.6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Hasil dari uji heteroskedastisitas untuk model pertama dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



Sumber: Data sekunder yang diolah

Gambar 4.3.
Grafik Scatterplot

Berdasar pada grafik scatterplot diatas, tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi heteroskedisitas.

4.7. Hasil Pengujian Model

4.7.1. Hasil Pengujian Signifikansi Simultan (Uji - F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau

dependen. Disamping itu, uji F atau Uji Anova ini digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Hasil uji F dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7.
Hasil Uji Signifikansi Simultan
(Uji - F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9.291	2	4.645	96.351	.000 ^a
Residual	3.905	81	.048		
Total	13.196	83			

a. Predictors: (Constant), LnRetribusi, LnPajak Daerah

b. Dependent Variable: LnPAD

Sumber: Data sekunder yang diolah

Sajian *output* dari uji anova atau uji f pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 96.351 dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar 0,000 (0%). Nilai probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 (5%) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Pajak Daerah dan Retribusi modai terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.7.2. Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji – t Statistik)

Uji – t statistik pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara masing-masing variabel dapat menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari dilakukannya uji – t statistik , dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8.
Hasil Uji T – Statistik
(Uji Hipotesis)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.602	1.030		7.382	.000
LnPajak Daerah	.499	.046	.688	10.735	.000
LnRetribusi	.176	.037	.304	4.736	.000

a. Dependent Variable: LnPAD

Sumber: Data sekunder yang diolah

Hasil pengujian t- statistik untuk pengujian hipotesis pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif (0.499) dengan nilai probabilitas 0.000. Jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pajak

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya hasil pengujian t- statistik untuk pengujian hipotesis pada tabel diatas menunjukkan Retribusi berpengaruh positif (0.176) dengan nilai probabilitas 0.000. Jika diukur dengan derajat signifikan 0,05 atau

5% maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Dari pengolahan data statistik, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{PAD} = 7.602 (a) + 0.499 \text{ Pajak Daerah} + 0.176 \text{ Retribusi Daerah} + 1.113 e \dots\dots (4.1)$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a)
Nilai konstanta diperoleh sebesar 7.602 yang berarti bahwa variabel independen yaitu Pajak Daerah dan retribusi adalah nol, maka nilai pendapatan asli daerah adalah sebesar 7.602.
- b. Koefisien Regresi (β) X_1
Koefisien variabel Pajak Daerah 0.499 yang berarti bahwa setiap peningkatan Pajak Daerah satu satuan, akan mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0.499 satuan.
- c. Koefisien Regresi (β) X_2
Koefisien variabel Retribusi Daerah sebesar 0.176, yang berarti bahwa setiap peningkatan retribusi satu satuan, akan mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0.176 satuan.

4.8. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Nilai (R^2) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.839 ^a	.704	.697	.21957

a. Predictors: (Constant), LnRetribusi, LnPajak Daerah

b. Dependent Variable: LnPAD

Sumber: Data sekunder yang diolah

Hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa, besarnya nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0.697 atau sekitar 69.7%. Hal ini memberi arti bahwa variabelitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabelitas variabel independen sebesar 69.7% sedangkan sisanya 31,3 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.9. Pembahasan Hasil Penelitian

4.9.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah diduga bahwa laju pertumbuhan Retribusi daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Hasil pengujian t- statistik untuk pengujian hipotesis pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif (0.499) dengan nilai probabilitas 0.000. Jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan Pajak Daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Atau sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan Pajak Daerah, maka akan semakin rendah pula tingkat pendapatan asli daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang baik pribadi maupun badan mempunyai kewajiban untuk membayar iuran kepada pemerintah daerah. Iuran wajib ini memiliki dasar hukum tetap yang diatur melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang sifatnya mengikat dan memaksa. Selain itu, pemberlakuan otonomi daerah menuntut adanya kemandirian dalam pembangunan daerah dan kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah harus berupaya secara maksimal untuk menghasilkan uang. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah demi mensejahterakan masyarakat di daerah. Jika hal ini terjadi maka daerah mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adi Nugroho (2013), dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2010-2012”, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD pada kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2010-2012. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis. Dengan

kesimpulan bahwa penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini yaitu, Penelitian yang dilakukan oleh Stevanus J. Gornes dan Victor Pattiasina (2011), dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, dengan tujuan untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji statistik, dengan kesimpulan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat menaikkan pendapatan asli daerah.

4.9.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah Diduga bahwa laju pertumbuhan Pajak Daerah daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon hasil pengujian t- statistik untuk pengujian hipotesis pada tabel diatas menunjukkan Retribusi berpengaruh positif (0.176) dengan nilai probabilitas 0.000. Jika diukur dengan derajat signifikan 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari retribusi akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Atau sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan retribusi, maka akan semakin rendah pula tingkat pendapatan asli daerah.

Retribusi Daerah yang diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah daerah menyediakan berbagai fasilitas baik kepada kepentingan individu maupun badan. Setiap individu atau badan yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah wajib memberikan iuran kepada pemerintah daerah karena telah menggunakan fasilitas yang disediakan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan demi penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerahpun sangat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Oleh sebab itu,

petugas pemerintah yang berwenang untuk menagih sampai mengelola retribusi daerah tersebut haruslah dengan pengawasan yang baik.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adi Nugroho (2013), dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2010-2012”, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD pada kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2010-2012. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis. Dengan kesimpulan bahwa penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4.9.3. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian dari perwujudan asas desentralisasi. Oleh sebab itu, besarnya tingkat pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya sumber pendapatan tersebut. Berikut ini dijelaskan laju pertumbuhan sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini diartikan sebagai penerimaan PAD Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon tahun 2007-2013. Penerimaan PAD dinyatakan dalam jumlah rupiah pertahun dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini;

Tabel 4.10
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2010-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan (%)
2010	20.619.217.534,59	0
2011	28.469.444.378,71	38,07
2012	29.657.499.802,42	4,17
2013	33.861.064.941,05	14,17
2014	53.330.515.868,43	57,50
2015	58.252.561.996,39	9,23
2016	66.178.584.704,93	13,61
Rerata	41.481.269.889,50	19,54

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Badan Keuangan Kota Ambon dengan rata-rata realisasi PAD sebesar Rp 41.481.269.889,50 dengan pertumbuhan rata-rata 19,54%. Selanjutnya, pertumbuhan tertinggi adalah sebesar 57,50% pada tahun 2012, sedangkan pertumbuhan terendah sebesar 4,17% pada tahun 2009. Pengukuran variabel penerimaan Pajak Daerah dinyatakan dalam jumlah rupiah pertahun seperti pada tabel berikut ini;

Tabel 4.11
Pertumbuhan Pajak Daerah
Tahun 2009-2015

Tahun	Pajak Daerah	Laju Pertumbuhan (%)
2010	9.728.221.264,00	0
2011	10.265.345.251,10	5,52
2012	15.129.828.891,00	47,39
2013	18.386.042.703,40	21,52
2014	32.930.258.138,20	79,10
2015	39.299.981.688,80	19,34
2016	44.983.335.424,40	14,46
Rerata	24.389.001.908,70	26,76

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel diatas enunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai laju pertumbuhan Pajak Daerah yang diterima oleh Badan Keuangan Kota Ambon, dengan rata-rata realisasi Pajak Daerah sebesar Rp 24.389.001.908,70 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 26,76%. Laju pertumbuhan tertinggi 79,10% pada tahun 2014, sedangkan laju pertumbuhan

terendah sebesar 5,52% pada tahun 2011. Pengukuran variabel penerimaan Retribusi Daerah dinyatakan dalam jumlah rupiah pertahun dinyatakan dalam tabel berikut;

Tabel 4.12
Pertumbuhan Retribusi Daerah
Tahun 2009-2015

Tahun	Retribusi Daerah	Laju Pertumbuhan (%)
2009	7.775.619.769,00	0
2010	10.542.361.251,41	35,58
2011	11.107.670.200,00	5,36
2012	13.918.430.009,83	25,30
2013	17.072.736.213,03	22,66
2014	15.936.944.023,00	-6,65
2015	17.660.700.927,00	10,82
Rerata	13.430.637.484,75	13,30

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai laju pertumbuhan Retribusi Daerah yang diterima oleh Badan Keuangan Kota tahun 2007-2013, dengan rata-rata realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp 13.430.637.484,- dengan laju pertumbuhan rata-rata 13,30%. Laju Pertumbuhan tertinggi 35,58% pada tahun 2010, sedangkan laju pertumbuhan terendah sebesar -6,65% pada tahun 2014.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Hasil regresi dari pengujian diperoleh nilai konstanta diperoleh sebesar 7.602 yang berarti bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah nol, maka nilai pendapatan asli daerah adalah sebesar 7.602. Koefisien Regresi variabel Pajak Daerah 0.499 yang berarti bahwa setiap peningkatan Pajak Daerah satu satuan, akan mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0.499 satuan. Koefisien Regresi Retribusi Daerah sebesar 0.176, yang berarti bahwa setiap peningkatan retribusi satu satuan, akan mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0.176 satuan

2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif (0.499) dengan nilai probabilitas 0.000. Jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan Pajak Daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Atau sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan Pajak Daerah, maka akan semakin rendah pula tingkat pendapatan asli daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Retribusi berpengaruh positif (0.176) dengan nilai probabilitas 0.000. Jika diukur dengan derajat signifikan 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari retribusi akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Atau sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan retribusi, maka akan semakin rendah pula tingkat pendapatan asli daerah.

Dari penelitian ini, dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya yaitu bahwa hasil penelitian memberi kenyataan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, proses penagihan, pengawasan serta pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan pada organisasi pemerintah daerah secara partisipasi untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah. Selain itu juga, pemerintah daerah dalam melakukan berbagai program yang mendatangkan kestabilan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan sumber-sumber pendapatannya.

Penelitian ini pada dasarnya memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat mengganggu penelitian, dimana;

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square*, sebesar 69.7%. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah tidak secara menyeluruh mempengaruhi pendapatan asli daerah.
2. Periode pengamatan yaitu selama 7 tahun atau sebanyak 84 observasi. Perilaku data tersebut, dimungkinkan akan membawa implikasi mengurangi kemampuan prediksi variabel dalam penelitian.

5.2. Saran Penelitian

Sesuai dengan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini ada beberapa saran yang akan diberikan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya antara lain;

1. Penelitian kedepan hendaknya memperbanyak sampel dengan memperluas pengamatan pada beberapa kabupaten kota yang ada di pemerintah provinsi Maluku, sehingga mampu menunjukkan hasil analisis yang baik dan dapat digeneralisasikan. Disamping itu sampel penelitian di update lagi untuk tahun-tahun berikutnya.
2. Hasil *Adjusted R Square* relatif menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat menambah bahkan menggunakan variabel-variabel lainnya untuk mendapatkan temuan-temuan baru yang lebih bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002)
- Bugis, Rifai. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Maluku Tahun 1990-2010*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Elmi, Bachrul. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gomes, Stevanus J. Dan Victor Pattiasina. 2011. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara*. Aset : Volume 13, Nomor 2, Halaman 175-183.
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Progran SPSS*. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kaho, Josep dan dan Ely. (2010). *Perpajakan Teori dan Teknik Perhitungan*. Jokjakarta: Graha Ilmu.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- _____. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

- Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Komsep Dasar Perpajakan : Konsep Dasar Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Nugroho, Adi. (2013). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2010-2012*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayat, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26.